

**NU DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL:
Studi Kasus pada PEMILUKADA di Kabupaten Sumenep
Tahun 2010**

Nurfaizin

Kementerian Tenaga Kerja

Alamat Email: nfdarain@gmail.com

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU) plays an important role in various aspects of Indonesians' life. In a political sphere, NU had become a respected political party. Eventually, NU decided to withdraw from politics through the declaration of khittah, which was mandated by the National Alim Ulama NU meeting at Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, East Java on 13-16 Rabi'ul Awwal 1404 H / 18-21 December 1983 M. However, this declaration is not immediately release its' cadres not to plunge in the political stage. Nowadays, many NU cadres occupying important positions both in local and the central government. Therefore, it is interesting to observe how local elite of NU in Sumenep during the local election contribute to shape political dynamics in the region. This research using qualitative research method by employing interpretive and naturalistic approaches to the subject of study. The key informants for this research are those who actively engage in politics, especially the elites of the NU and their followers. This study found that there are continuity relations between the NU elites who take part in practical political stage and those who are behind the political stage. In addition, the battle of several candidates for government position among the local elites of NU pushed the blessing of kyai away from the significant factor of voters to decide whom they had chosen in the last election.

Key words: NU, Local Election, Kyai, and Politics.

Intisari

NU (Nadlatul Ulama) berperan penting dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ranah politik, NU pernah menjadi sebuah partai besar yang disegani. Akhirnya ia memilih keluar dari lingkaran percaturan politik praktis melalui khittah NU 1926 yang dipuruskan melalui musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 13-16 Robi'ul Awwal 1404 H/18-21 Desember 1983 M. Sejak saat itu NU dan politik terpisah secara praktis. Namun demikian tidak dengan serta merta melepas para kader-kadernya untuk tidak terjun di panggung politik. Saat ini telah banyak kader NU menduduki posisi penting baik di pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari background rumah asal mereka sebagai golongan nahdliyin. Begitu pula yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep. Sejak pemilihan umum secara langsung tidak sedikit kader NU duduk di pemerintahan lokal sebagai DPRD ataupun kepala pemerintah daerah (bupati). Yang menjadi persoalan utama di sini ialah tidak hanya mereka yang menang merebut kuasa, namun lebih pada bagaimana pengaruh elite lokal NU dalam dinamika Pemilukada di Kabupaten Sumenep terutama pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Sedangkan lokasi penelitian ialah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sasaran penelitian masyarakat Sumenep dan elite NU Kabupaten Sumenep. Walau penelitian berlangsung selama satu bulan penelitian termasuk *preliminary research*. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa rangkaian kesinambungan antara elite NU yang berkiprah di panggung politik praktis dan mereka yang berada di belakang panggung. Selain itu pertarungan beberapa calon kepala pemerintahan yang nota bane adalah rata-rata sebagai warga nahdliyin tidak menjadikan pengaruh atau restu kiai sebagai alasan utama pemilih pada Pemilukada tahun 2010 memilih calon yang dikehendaki.

Kata Kunci: NU, Pemilukada, Pengaruh, Kiai, Sumenep

Pendahuluan

NU sejak kelahirannya tidak memposisikan diri sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi sosial keagamaan. NU lebih menjadi kekuatan politik kebangsaan daripada politik praktis.¹ Walaupun dalam perjalanannya NU sempat juga menjadi Partai Politik yakni pada tahun 1952 setelah menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut 45 juta jiwa.² Tidak heran, dengan jumlah pengikut sebanyak itu di setiap menjelang pemilu, NU bagai madu di taman yang siap dihisap oleh para kumbang. NU seperti rumah besar yang menyediakan banyak madu. Kunjungan Capres dan Cawapres tidak sekadar silaturahmi, tetapi sekaligus ajang “tawar menawar” politik, baik untuk jabatan menteri, dirjen, irjen, maupun yang lainnya. Terlebih lagi warga NU itu dikenal ramah, terbuka, toleran, mudah memaafkan, dan mudah diarahkan oleh tokoh lokal.³

Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, tepatnya di Jawa Timur, pengurus wilayah NU Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan berupa edaran ke seluruh cabang-cabang di seluruh wilayah tersebut untuk mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres yaitu Jusuf Kalla dan Wiranto. Dalam hal ini, NU sudah terlibat dalam politik praktis yang tentunya bertolak belakang dengan semangat khittah NU 1926 yang menyatakan NU sebagai jamiyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.⁴ Fenomena dukung-mendukung salah satu calon bukan hanya pada pemilu presiden dan legislatif tapi juga pada Pemilu lokal baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, seperti halnya di salah satu kabupaten paling ujung timur di pulau Madura yaitu Sumenep yang penduduknya berjumlah 1.136.000 jiwa.⁵

Kiai dalam masyarakat Madura sangat vital perannya dalam berbagai sendi kehidupan. Ini bisa dilihat dari ajaran yang selama ini dipegang teguh orang Madura, yang berbunyi *bhuppa'*, *bhabbhu*, *ghuru*, *rato* (bapak, ibu, guru/kiai dan raja/pemerintah). Ketaatan kepada orang tua (bapak/ibu) menjadi ketaatan yang paling tinggi yang

1 Lihat KOMPAS edisi Jumat, 19 Maret 2010

2 Lihat KOMPAS edisi Jumat, 16 April 2010

3 Ahmad Nurhasim dan Nur Kholik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm. xi

4 Teks khittah NU hasil muktamar NU ke- 27 di Situbondo, coba lihat selengkapnya dalam Ahmad Nurhasim dan Nur Kholik Ridwan. *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*. (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm. 175

5 http://www.sumenep.go.id/berita_c.php?pid=11234, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20:03

harus dijunjung. Disusul ketataan kepada kiai baru kemudian kepada pemerintah. Posisi kiai mendapat posisi yang terhormat lebih tinggi derajatnya dari pemerintah. Kiai selalu menjadi rujukan masyarakat Madura dalam pengambilan keputusan terkait dengan hidupnya. Tidak hanya pada wilayah sosial keagamaan saja akan tetapi juga persoalan-persoalan yang sebenarnya “bukan” keahliannya seperti persoalan-persoalan ekonomi dan politik.⁶ Posisi istimewa ini didapat berkat “kharisma” yang melekat pada sosok kiai. Kiai dianggap mempunyai kekuatan supra natural yang tidak dimiliki sembarang orang.⁷

Kharisma itu didapatkan berkat dua dimensi yang dipunyainya. *Pertama*, kharisma yang diperoleh secara given, seperti adanya ikatan genealogis dengan kiai kharismatik sebelumnya, tubuh yang besar serta suara yang keras. *Kedua*, melalui proses perekayasaan. Dalam arti melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang shaleh, dan kesetiaan untuk berbagi kepada sesama.⁸ Melalui kharisma yang melekat padanya, kiai menjadi imam tidak hanya pada urusan-urusan *ubudiyah* tetapi juga pada urusan-urusan politik. Sangat gampang ditemui menjelang *even-even* politik seperti pemilihan legislatif dan Pemilukada, banyak calon memerlukan *sowan* dan memohon restu politik kepada para kiai yang dianggap mempunyai kharisma untuk melegitimasi dia sebagai calon yang pantas untuk dipilih.

Dari kharisma kiai inilah, NU dengan mudah memobilisasi massa untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Ini menjadi semacam *social capital* dalam memperkuat pengaruh dan otoritasnya di tengah masyarakat. Banyaknya calon bupati dan wakilnya yang berasal “dari” NU menandai persaingan yang kuat untuk berebut kantong suara yang berasal dari kaum *nahdiyyin*. Setidaknya lima pasangan dari delapan calon bupati dan wakilnya pada 2010 lalu merupakan kader-kader NU. Ini bisa dilihat dari jejak rekam karier masing-masing calon yang pernah ataupun yang masih aktif dalam kepengurusan NU seperti salah satu calon Bupati yang berangkat dari jalur independen yaitu KH. Ilyasi Siraj yang pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Cabang NU (PCNU) Sumenep periode 2000- 2005.⁹

6 Untuk lebih jelasnya baca skripsi Ahmad Chufroon Sirodj yang berjudul *Peran dan Posisi Kiai di Tengah Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama 2008)

7 Max Weber, *Sosiologi*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2006), hlm. 292-301

8 Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004), hlm. 87-97

9 Untuk profil lengkap pasangan calon Bupati dan wakilnya lihat <http://www.smpn1.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xMTE5>

Studi ini memfokuskan bahasan pada pengaruh elit lokal NU dalam dinamika Pemilu pada di Kabupaten Sumenep 2010. Dimana posisi kiai mendapat posisi yang terhormat lebih tinggi derajatnya dari pemerintah. Kiai selalu menjadi rujukan masyarakat Madura dalam pengambilan keputusan terkait dengan hidupnya. Tidak hanya pada wilayah sosial keagamaan saja akan tetapi juga persoalan-persoalan yang sebenarnya “bukan” keahliannya seperti persoalan-persoalan ekonomi dan politik.¹⁰ Posisi istimewa ini didapat berkat “kharisma” yang melekat pada sosok kiai. Kiai dianggap mempunyai kekuatan supra natural yang tidak dimiliki sembarang orang.¹¹ Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena sosial politik yang muncul berkaitan dengan otoritas keagamaan. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan proses Pemilu pada di Kabupaten Sumenep tahun 2010, yang secara tidak langsung melibatkan NU sebagai organisasi keagamaan dalam prosesnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kabupaten Sumenep. Metode studi yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif, yang berarti bahwa para peneliti kualitatif harus mempelajari benda-benda di dalam konteks alamnya, berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya.¹²

Sejarah Singkat Kelahiran NU dan Kebangkitan Nasional

Kelahiran NU tidak bisa dilepaskan dari percaturan politik nasional maupun internasional pada awal- 1920-an. Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi

NA%3D%3D, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 21

¹⁰ Untuk lebih jelasnya baca skripsi Ahmad Chufon Sirodj yang berjudul *Peran dan Posisi Kiai di Tengah Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama 2008)

¹¹ Max Weber, *Sosiologi*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2006), hlm. 292-301

¹² Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 1-2

pendidikan dan pembebasan, seperti antara lain Budi Utomo¹³, Syarikat Islam¹⁴ yang kemudian disusul oleh Muhammadiyah.¹⁵

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916, yang didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah. Organisasi ini berkantor di Surabaya dengan gedung yang besar dan bertingkat. Di tempat inilah lama-kelamaan menjadi markas 'tempat menggembelng' para remaja yang akan menjadi calon pemimpin. Cabang-cabang Nahdlatul Wathan berdiri di Semarang, Malang, Sidoarjo, Gresik, lawang dan Pasuruan.¹⁶

Beranggotakan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional serta ad hoc, maka dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan *kitab qanun asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan *kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian dijawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan.

Struktur Kepemimpinan dalam Masyarakat Sumenep

Struktur kepemimpinan dalam Masyarakat Sumenep secara garis besar sama dengan masyarakat Madura pada umumnya, bahwa mereka memiliki konsep *bhuppa'-bhabhu-ghuru-rato* dalam hierarki kepatuhan dalam budaya kehidupannya. Konsep ini hingga saat ini

¹³ Budi Utomo suatu perhimpunan Jawa yang berdiri tanggal 20 Mei 1908. lihat di *Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo*, terjemahan, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm. 62

¹⁴ Serikat Islam berdiri tanggal 11 November 1912 di Solo merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam yang berdiri satu tahun sebelumnya. Organisasi ini sedikitnya didorong oleh dua hal yaitu kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik terutama dari golongan Cina dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina tahun 1911. Lihat Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm 115

¹⁵ Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh KH. Ahmad dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. *Ibid*, hlm 116

¹⁶ Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm 8

masih mengakar kuat sebagai penyangga bagi peradaban kebudayaan masyarakat Madura. Hal ini tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang sudah lekat bagi sebagian besar masyarakat Madura.

Konsep *bhuppa'-bhabhu-ghuru-rato* merupakan konstruksi kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode sejarah yang relatif panjang. Ia dihasilkan oleh dan sekaligus menghasilkan kehidupan sosial, sehingga ia menjadi kekuatan yang menstruktur kehidupan sosial (*structuring structure*), sekaligus pula sebagai kekuatan yang distrukturisasi oleh kehidupan sosial (*structured structure*).

Masyarakat Madura, terutama pada pedesaan menganggap kyai sebagai pemimpin dunia sekaligus akhirat atau dengan kata lain sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam hal kepemimpinan dalam masyarakat Madura, kepemimpinan kharismatik seorang kyai memiliki peran yang utama dalam segala aspek kehidupan. Melalui kharisma yang melekatnya pada dirinya, kyai menjadi imam dalam bidang *'ubudiyah* dan sering dipinta untuk menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat ini, seolah memperkuat posisi seorang kyai sebagai pemimpin yang memang dibutuhkan tidak hanya untuk persoalan keagamaan saja, akan tetapi menyangkut persoalan keduniawian seperti penentuan jodoh, pencarian hari baik untuk bepergian, serta segala hal dalam segala aspek kehidupan lainnya.

Biasanya gelar kyai ini diberikan masyarakat kepada seorang tokoh yang dianggap pantas menerimanya. Tokoh yang bersangkutan biasanya memiliki pengakuan sebagai seorang kyai karena faktor keturunan atau karena kelebihan tertentu. Oleh sebab itu, gelar kyai bagi masyarakat Madura tidak hanya panggilan bagi seorang tokoh yang memiliki pesantren saja, tapi biasanya juga dilekatkan pada tokoh kharismatik yang selalu mengajarkan dan menyebarkan ilmu-ilmu agama melalui pengembaraan ke desa-desa yang lain selain desa asalnya.

Kyai jenis ini biasanya disebut sebagai kyai teko, yaitu diibaratkan seperti teko berisi air yang selalu menuangkannya kepada orang yang membutuhkannya. Sementara seorang kyai yang memiliki pesantren biasanya disebut sebagai kyai sumur, yaitu diibaratkan sebagai tempat menimba bagi orang membutuhkannya. Kharisma kyai memperoleh dukungan masyarakat karena dipandang memiliki kemapanan moral, dan kualitas iman yang melahirkan model magnetis bagi para pengikutnya. Dengan kekharismaannya, seorang kyai tidak hanya dikategorikan sebagai elite agama, akan tetapi sebagai elite

pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan ilmu-ilmu keagamaan Islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinannya.¹⁷

Kepemimpinan seorang kyai sering dikaitkan dengan faktor ketokohnya yang kharismatik. Dalam konteks tersebut, Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa kyai-kyai Pondok Pesantren dalam sejarahnya, merupakan sosok yang penting yang dapat membentuk kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga muslim Indonesia.¹⁸ Pengaruh tersebut bagi santri berlaku tidak hanya pada saat santri masih berada pada naungan pesantren yang bersangkutan, akan tetapi dalam kurun waktu yang panjang pengaruh tersebut akan melekat sepanjang hidup ketika ia sudah terjun di tengah-tengah masyarakat.

Paham Keagamaan NU

NU menganut paham *Ahlussunah waljama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya *al-Qur'an*, *sunnah*, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Dari segi nama menurut Jalal Muhammad Musa, *Ahlussunah waljama'ah* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, *sunnah* berarti metode atau tariqah yaitu mengikuti metode para sahabat dan tabiin serta salaf dalam memahami ayat-ayat *mutasyabihat*¹⁹ dengan menyerahkan sepenuhnya pengertian ayat tersebut kepada Allah sendiri tidak mereka-reka menurut daya nalar manusia semata-mata. *Kedua*, *sunnah* berarti hadis Nabi Muhammad SAW yaitu meyakini kebenaran hadis shahih sebagai dasar keagamaan.

20

Rangkain kata *sunnah* dengan *jama'ah* menjadi *Ahlussunah waljama'ah* memberi arti bahwa dasar keagamaan yang dianut bersumber kepada Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi dan *sunnah* para sahabat, yaitu tradisi yang telah melembaga dalam kehidupan sosial keagamaan para sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat khususnya zaman *Khulafaur Rasyidin*. Pola dasar pemahaman

17 Sebagaimana dikutip oleh Edi Susanto, *Kepemimpinan Kharismatik Kyai*, dalam *KARSA Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XI No. 1 April, 2007, hlm 32

18 *Ibid*, hlm 34

19 Ayat *mutasyabihat* ialah ayat yang mengandung kata yang artinya kurang atau tidak jelas atau memang kata yang artinya ganda seperti kata *wajh*, *yad arsy* dan *inzal* dalam bidang *kalam* dan *lams* atau *quru'* dalam bidang fikih, lihat M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm 67

20 *Ibid*, hlm 67

keagamaan yang demikian ini berbeda dengan golongan *khawarij*, *syiah* atau *muktazilah*. Mereka umumnya menekankan interpretasi rasional dalam memahami ayat-ayat *mutasyabihat* dan mengabaikan hadis Nabi Muhammad dan tradisi sahabat Nabi.²¹

Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Aliran tersebut merupakan jalan tengah antara rasionalisme *mu'tazilah* dan antropomorpisme *jabariyah* dengan pendekatan yang menggabungkan aspek rasional (akal) dan teks (*naql*).²² Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Dengan konsep madzhab empat ini secara teoritis NU memiliki keleluasaan menerapkan kebijaksanaan *jam'iyyah* untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul sehingga tidak kaku dengan berbagai alternatif dari pendapat-pendapat madzhab yang ada. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Jadi madzhab *ahlussunnah wal jamaah* yang dianut NU merupakan pendekatan yang multidimensional dari sebuah gugusan konfigurasi aspek-aspek *kalam*, *fikih* dan *tasawwuf*. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh, masing-masing tidak dipilah dalam trikotomi yang satu berbeda atau berlawanan dengan yang lain. Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *ahlussunnah wal-jamaah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang *fikih* maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Akar Historitas Keterlibatan NU dalam Politik

Irama politik yang diperankan NU, sangat menarik untuk ditelaah, terutama arah kebijakan politiknya yang selalu bergeser dari waktu ke waktu. Sesuai kecenderungan dan perkembangan sikap politik yang diambil NU, Martin Van Bruinessen mengikuti suatu periode pembagian konvensional yang diantaranya sebagai berikut:

"pada periode pemerintahan kolonial Belanda (1926-1942) yang kemudian

²¹ *Ibid*, hlm 68

²² *Ibid*, hlm 75

diikuti masa Pendudukan Jepang (1942-1945), periode perjuangan kemerdekaan (1945-1949), periode tahun-tahun demokrasi parlementer (1949-1959), periode demokrasi terpinpinnya Soekarno (1959-1965), masa tradisi yang keras (1965-1966), masa Orde Barunya Soeharto (1967-1998), dan pada masa era reformasi."²³

Peranan penting NU dalam kehidupan politik pada masa-masa penjajahan sungguh tidak dapat diabaikan. Berdirinya Serikat Dagang Islam (1911) yang didominasi oleh kelompok Islam modernis yang ada diperkotaan merupakan salah satu upaya para ulama untuk menghapus penjajahan di tanah air ini.²⁴ Selain itu berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 juga tidak lepas dari situasi waktu itu.²⁵ Dengan pengaruhnya yang kuat dan luas, NU berhasil memobilisasi para petani, rakyat dan massa untuk bangkit sebagai kekuatan akar rumput melawan kesewenang-wenangan kaum penjajah.

Diantara kesuksesan perjuangan NU dalam melawan penjajahan diantaranya:²⁶

- a. Memperjuangkan pencabutan *Guru Ordonantie* yang dialamatkan kepada sekolah-sekolah dan pesantren.
- b. Menolak kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut artikel 117 *Indische Startregeling* yang mengandung semangat dan politik diskriminasi golongan dan agama.
- c. Melarang pemuda-pemudi Islam memasuki milisi Belanda untuk menghadapi tentara Jepang.
- d. Mengharamkan pemberian sumbangan darah bagi kepentingan militer kolonial Belanda.
- e. Menolak subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda kepada madrasah-madrasah NU.
- f. Memprotes penarikan masalah warisan dari wewenang pengadilan agama.

Semangat perlawanan terhadap penindasan kolonial juga dipicu oleh *jihād fisabilillah* yang kemudian di kenal dengan Resolusi Jihad.²⁷ Hal itu juga diperkuat diperkuat oleh pidatonya Kiai Hasyim Asy'ari pada pembukaan muktamar NU ke-16. Pergeseran perilaku politik kiai yang cukup signifikan itu akhirnya dapat melahirkan tiga

²³ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm 41-42

²⁴ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa NU Dibdohi, Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002), hlm 58-59.

²⁵ *Ibid*, hlm 56

²⁶ *Ibid*, hlm 59

²⁷ *Ibid*. hlm 61

kebijakan politik strategis, yakni resolusi jihad, pembubaran PKI, dan penerimaan asas tunggal Pancasila.

1. Resolusi Jihad

Ini momentum histories pertama yang dilakukan NU dalam gerakan-gerakan politiknya, yakni dengan dicetuskannya Resolusi Jihad, pada tahun 1945. Resolusi Jihad memiliki dampak yang luas di Jawa Timur. Pasukan-pasukan reguler yang dikenal dengan Sabilillah rupanya respon langsung atas resolusi jihad. Resolusi Jihad ini dicetuskan oleh NU di Surabaya, ketika organisasi ini masih berstatus sebagai gerakan sosial keagamaan dan belum mentransformasikan dirinya menjadi partai politik.²⁸ Kendatipun demikian, NU sangat menaruh perhatian kepada masalah-masalah politik, perjuangan kemerdekaan, nasib bangsa, dan masa depan Indonesia.

Dalam perspektif keindonesian, Resolusi Jihad ini dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dan manifestasi partisipasi politik dan keterlibatan perjuangan NU dalam hidup berbangsa dan bernegara. Inti Resolusi Jihad ini adalah mewajibkan para ulama dan seluruh anggota NU serta umat Islam, secara bersama-sama dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat lainnya, menentang bercokolnya kembali kolonialisme dan imprealisme di Indonesia.

2. Pembubaran PKI

Momentum historis kedua yang dilancarkan NU dalam gerakan-gerakan politiknya terjadi ketika partai NU pada tahun 1965 menuntut dibubarkannya PKI. Pada waktu itu, NU dikenal sebagai satu-satunya kelompok dan partai politik pertama yang mengajukan tuntutan dibubarkannya PKI, karena partai yang beraliran komunis ini telah diketahui secara jelas sebagai dalang dan arsitek pemberontakan G30S/PKI.²⁹ Sementara, kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan dan partai politik lain belum mengambil sikap politik terhadap peristiwa tersebut, NU telah tampil di barisan paling depan dan mengajukan tuntutan bagi pembubaran PKI. Dilihat dari perspektif kerakyatan, kebangsaan, dan keindonesiaan, gerakan politik NU yang menuntut pembubaran PKI ini dapat dipandang sebagai manifestasi dan substansi komitmen NU dalam perjuangan berbangsa dan bernegara.

²⁸ *Opcit*, hlm 61

²⁹ *Loc,cit*, hlm 61

3. Penerimaan Asas Pancasila

Momentum historis ketiga yang mengisi lembaran sejarah NU terjadi pada tahun 1984, ketika organisasi *jam'iyah diniyah* ini menyatakan penerimaannya atas Pancasila, sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan.³⁰ Peristiwa ini, juga menempatkan NU sebagai satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Dengan argumen historis bahwa K.H.A. Wahid Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila dan didukung oleh argument-argument agamis yang dirumuskan para ulamnya, NU tidak ragu-ragu menerima asas Pancasila.³¹

Dalam penerimaan asas tunggal ini, NU menyatakan bahwa ia berasas Pancasila dan berakidah Islam *ala ahlussunnah wal jama'ah*. Dengan formula ini, NU tidak menempatkan Pancasila dan Islam sebagai sesuatu yang paradoks dan antagonistis, tetapi meletakkan keduanya dalam perspektif dan konteks keindonesiaan dan keislaman. Salah seorang kiai senior NU yang terkenal dalam merumuskan penerimaan NU terhadap asas Pancasila ini adalah K. H. Ahmad Siddiq.³²

Masa Perubahan Arah Politik NU

Kebijakan tiga politik strategis, seperti yang dijelaskan di atas, yakni resolusi jihad, pembubaran PKI, dan penerimaan asas tunggal Pancasila, merupakan contoh kebijakan politik NU. Sementara, program-program politik yang dijalankan NU, baik sebagai partai maupun keterlibatannya dalam membentuk partai (misalnya PKB atau PPP), dalam banyak hal mengarah ke politik kekuasaan, karena selalu terkait dengan upaya-upaya yang bersifat perebutan kekuasaan.

Bagi sebagian orang, dunia politik (praktis) adalah sederetan kursi empuk yang menyenangkan. Itulah sebabnya, tujuan politik antara lain adalah merebut sebanyak kursi, kedudukan dan posisi di pemerintahan. Banyak orang, termasuk kiai-kiai yang tergabung dalam NU, yang suka pada posisi semacam itu.³³ Akibat adanya perebutan kekuasaan ini terjadi polarisasi politik atau kepentingan politik yang menyebabkan terjadinya perseteruan di dalam NU sendiri, antar kiai

30 Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm27

31 *Ibid*, hlm 27

32 *Ibid*, hlm 125

33 Fran Magnis Suseno, *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm 59

dan antar pesantren di bawah naungan NU. Disamping itu, karena kiai NU atensi dan energinya terserap dalam dunia politik, banyak kiai kurang atau tidak memberikan perhatian mereka secara penuh terhadap pesantren dan madrasah yang mereka asuh. Karenanya, banyak pesantren dan madrasah yang kurang berkembang dan bahkan nasibnya tidak menentu.

Di era reformasi, sebenarnya, kesempatan untuk memperbaiki sistem pemerintahan sangat luas. Ikut andil dalam menciptakan *good government* tidak seluruhnya harus melalui kedudukan dan posisi di pemerintahan, tetapi melalui tradisi sikap oposisi.³⁴ Dapat dipahami juga, pergeseran kebijakan politik kebangsaan ke politik kekuasaan yang dilakukan NU sangat terkait dengan upaya kepentingan sesaat, yakni masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan. Kecenderungan ini terjadi, karena dipengaruhi oleh reformasi politik yang memberi kebebasan politik kepada semua warga negara, baik dilakukan secara individual maupun kelompok.

Konstalasi Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010

Dalam pemilukada di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada 14 Juni 2010, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Anggota KPU Sumenep menetapkan delapan pasangan calon yang maju pada Pemilu Kepala Daerah (pemilukada) Sumenep.³⁵ Namun demikian, jika salah satu pasangan calon tidak berangkat dari latar belakang kalangan *nahdliyyin* ataupun pondok pesantren maka dapat dipastikan tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Kekuatan politik yang dijalankan oleh masing-masing calon peserta Pemilukada 2010 kemarin sebagian besar dipengaruhi oleh gerakan kultural masyarakat yang berbasis *nahdliyyin*. Hal tersebut nampak pada saat pemungutan suara. Yang memperoleh suara rata-rata terbanyak dari masing-masing calon didukung oleh kalangan masyarakat yang berpaham, meminjam bahasanya As. Hikam, NU kultural. NU kultural merupakan paham yang dianut mayoritas masyarakat Sumenep. Banyak kiai, pesantren, masjid, serta paham-paham *ahlussunnah waljama'ah* lainnya (seperti tahlil, qunut, talqin, dll) secara historis-sosial menggerakkan masyarakat untuk memilih calonnya yang latar belakangnya berpaham *ahlussunnah waljama'ah*.

34 H. Rozikin Damam, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm 207

35 <http://berita-lampung.blogspot.com/2010/06/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html>, diakses pada 24 Maret 2011, jam 4:22.

Walaupun terdapat calon yang tidak berpaham *ahlussunnah waljama'ah*, seperti misalnya calon yang diusung oleh parpol PAN dan Hanura (Malik Efendi, SH, M.H dan Rahmad, SE) memperoleh suara 48.013 suara, secara tersirat dapat disimpulkan sementara bahwa kekuatan NU kultural sangat berpengaruh dalam konstalasi pemilihan kepala daerah di Kab. Sumenep pada 2010 lalu.

Terbukti kekuatan kultural NU pada konstalasi politik pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Sumenep sejak awal pelaksanaan pemilu secara langsung berkali-kali dimenangkan oleh pasangan yang berangkat atau berlatar belakang paham NU atau *ahlussunnah waljama'ah*. Terlebih pada pelaksanaan pemilukada tahun 2010 kemarin yang berlangsung selama dua putaran selalu dimenangkan oleh pasangan dari NU. pada putaran pertama pemenangnya ialah pasangan KH. Busyro Karim, M.Si - Ir. H. Soengkono Sidik dengan perolehan suara 116.677 dan pasangan H. Azazi Hasan, SE, MM - Hj. Dewi Khalifah, SH, MH dengan perolehan suara 111.569. Sedangkan pada putaran kedua KH. Busyro Karim, M.Si - Ir. H. Soengkono Sidik dengan perolehan suara 241.622 dan pasangan H. Azazi Hasan, SE, MM - Hj. Dewi Khalifah, SH, MH dengan perolehan suara 231.250.

Kedua pasangan tersebut semuanya berlatar belakang *nahdliyin* atau dengan kebiasaan dan tradisi kaum pesantren. Misalnya pemenang putaran kedua KH. Busyro Karim, M.Si merupakan pengasuh pondok pesantren Baraji. Ia pernah mengenyam pendidikan tinggi di IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah. Selain menjadi pemangku agama, ia juga menjabat sebagai salah satu pengurus cab. NU di kabupaten Sumenep sedangkan wakilnya Ir. H. Soengkono Sidik walaupun sebagai birokrat ia masih memiliki darah NU. Bapaknya merupakan salah satu pengurus MWC NU di Karangduwek Sumenep.

Memang dalam sejarah pemilukada langsung pasca reformasi calon yang berlatar belakan dari NU atau berpaham *ahlussunnah waljama'ah* mempunyai kans besar memenangkan pertandingan pemilihan kepala daerah di kabupaten Sumenep. Misalnya bupati terdahulu, K.H.Ramdhan Siradj secara aklamasi memenangkan suara di berbagai wilayah pemilihan di berbagai kecamatan. Tidak heran kemudian bila ia terpilih selama dua kali sebagai kepala daerah (bupati) kabupaten Sumenep. Kemenangan KH. Ramdan Siraj selama dua periode juga dipengaruhi oleh ketokohan Beliau sebagai salah satu kiai terpandang yang berasal dari NU. Ia menduduki jabatan sebagai bupati selama periode 2000-2005 dan 2005-2010. Ketokohan

K.H. Ramdhan Siradj sebagai kiai, pengasuh pesantren, plus juga sebagai pengurus NU cabang kabupaten Sumenep.

Konstelasi politik di kabupaten Sumenep diyakini masih menomorsatukan bagi calon dari kalangan NU atau *ahlussunnah waljama'ah*. Hal tersebut diakui oleh Khalqi Kr, bahwa posisi kiai sebagai pranata sosial ganda (pemangku agama dan sosial) masih relevan di tengah-tengah realitas hubungan masyarakat yang berpaham *ahlussunnah waljamaa'ah* kultural.

*"Kemenangan orang yang dari NU tidak akan bergeser pada untuk beberapa tahun selanjutnya selama masih ada keterikatan emosi-sosial antara kiai dan masyarakat." masih berkeyakinan bahwa posisi kiai sebagai pemangku agama dan sebagai institusi personal pranata sosial."*³⁶

Pernyataan Khalqi tersebut senada dengan teori Max Weber tentang kharisma. Karakter kharismatik yang melekat pada diri seorang kiai tidak serta merta diciptakan secara *an sich*. Ia melalau proses kultural jangka panjang dengan identifikasi moral dan keteguhan agama sebagai pemimpin umat. Masyarakat sebagai bagian kultural dari sistem kharisma tersebut secara tidak langsung membuat pilihan tidak berdasar pada pilihan pribadi semata, namun restu, pilihan, dan *tausiah* dari seseorang yang mempunyai kharisma (dalam hal ini kiai) mempunyai andil yang sangat signifikan bagi terbentuknya kesadaran patron politik masyarakat Sumenep. Yang dimaksud oleh Johnson sebagai "mereka" mengacu pada realitas sosial masyarakat Sumenep tidak lain ialah warga *nahdliyin* atau masyarakat yang berpaham *ahlussunnah waljama'ah* dan atau NU kultural, yang mana "terdapat hubungan erat antara agama dan perilaku politik. Keanggotaan dan kegiatan keagamaan satu komunitas dengan nilai-nilai dan orientasi tertentu mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap perilaku politik mereka."³⁷

*"Mereka memperoleh bimbingan yang terus-menerus dari pemimpinnya, dan meminta nasihatnya dalam menghadapi kesulitan, mengambil keputusan dan menyelamatkan sumber-sumber penghasilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup."*³⁸

Secara sosiologis masyarakat di Madura khususnya di kabupaten Sumenep meminjam bahasanya Emha Ainun Najib, ketika

³⁶ Wawancara dengan Khalqi Kr, S.Ag pada 3 Januari 2011, jam 20.40 WIB di kediamannya.

³⁷ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, Juli 2004, hlm. 159

³⁸ Doyle Paaul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terj)*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 230

ditanya agamanya mereka akan menjawab beragama NU. Keterikatan hubungan masyarakat dengan kiai dan keberagaman masyarakatnya yang taat terhadap pemimpinnya (terutama kiai). Dominasi NU dalam perpolitikan di Sumenep sangat kuat ini dibuktikan dengan terpilihnya KH. Romdhan Siraj dua kali berturut turut dengan jumlah suara mayoritas. Selain itu juga perolehan kursi partai-partai berbasis NU sangat signifikan. PKB misalnya dalam pemilu tahun 1999 memperoleh kursi 25 dari total 50 kursi yang diperebutkan. Pada tahun 2004 PKB mendapat kursi 20 dan pada tahun 2009 kemarin memperoleh kursi 15. Gerakan politik berbasis tradisi nasionalisme-*ahlussunnah waljama'ah* ini secara historis telah terbangun sejak NU berdiri sebagai organisasi sosial keagamaan, berubah menjadi gerakan politik praktis dan kembali lagi menjadi organisasi massa sosial keagamaan hingga kini.

Konstelasi politik di kabupaten Sumenep tidak hanya mensyaratkan kiai dan nilai *ahlussunnah waljama'ah* menjadi jalan utama terbangunnya patron politik. Lain itu kekuatan finansial dari masing-masing calon didorong juga oleh kalangan teknokrat atau para pengusaha lokal. Seperti dikatakan oleh H. Pandji Taufik, bahwa perpolitikan di negeri ini, terutama di Sumenep biaya untuk menang atau minimal biaya kampanye menghabiskan dana yang tidak sedikit. Di kabupaten Sumenep pada pelaksanaan pemilukada 2010 kemarin secara akumulatif dua putaran menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah.

"Saya pikir kan begini ya. Menurut saya pemilu itu kontes demokrasi tapi saya merasa masih sifatnya transaksional. Untuk kasus yang di sumenep, misalnya ada istilah 'tongket' settong saeket'. Kecuali menunggu masyarakatnya sudah jadi pemilih yang rasional dan cerdas."³⁹

Istilah *tongket settong saeket* bermakna tongkat yang diikat menjadi satu. Istilah tersebut merupakan istilah lokal bagi keberlangsungan perpolitikan baik dari tingkat bawah (desa) hingga atas (kabupaten dan nasional). *Tongket settong saeket* mempunyai makna sosiologis sebagai hubungan emosional suatu struktur masyarakat selain dapat dibangun oleh pencitraan sosial yang baik, dapat pula dan sudah menjadi rahasia umum acap dibarengi dengan 'ongkos' politik yang diberikan 'secara cuma-cuma' kepada para pemilih atau pemilih yang mempunyai otoritas sosial tinggi di suatu desa.

³⁹ Wawancara dengan H. Pandji Taufiq di kediamannya pada tanggal 4 April 2011, jam 09.30 WIB.

Adanya kekuatan politik NU kultural di kabupaten Sumenep secara tidak langsung membenarkan teori hegemoni Gramscian. Gramsci membenarkan bahwa hegemoni sosial secara bertahap dibangun oleh kekuatan orang-orang atau institusi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap realitas sosial. Hegemoni yang digaris bawahi oleh Gramsci seakan-akan memberikan gambaran ‘paksaan’ secara kultural yang dibangun oleh beberapa orang atau kelompok.

Kepentingan politik yang dibangun dari relasi sosial hegemonik menurut ukuran Gramscian menemukan relevansinya ketika suatu perubahan sosial terjadi atas dasar kekuatan suatu kelompok atau konstruksi hegemonik yang menjadikan peran intelektual dan emosi sosial menjadi senjata utama. Hegemoni intelektual dan emosi sosial terlihat dari pemilihan kepala daerah di kabupaten Sumenep yang menjadikan sosok kiai atau tokoh berpengaruh dengan segala atribut sosialnya termasuk di dalamnya keikutsertaan dalam organisasi keagamaan sosial seperti NU secara bertahap membentuk suatu pranata sosial. Suatu institusi non-formal yang mengantarkan kepercayaan publik di dalam titik kesadaran pengabdian baik dalam urusan keagamaan, budaya, politik dan bahkan ekonomi.

1. Hasil Perolehan Suara Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010

Tabel 1. Kedelapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumenep dan partai yang mengusungnya⁴⁰

No.	Nama Pasangan Calon	Sebutan	Parpol Pengusung
1.	H Azasi Hasan - Hj. Dewi Khalifah,SH, MH	ASHIFA	PKNU dan PBB
2.	KH. A. Busyro Karim, M.Si - Ir. H. Soengkono Sidik	ABUSIDIK	PKB dan PDI
3.	Malik Efendi, SH, MH., - Rahmad, SE	MAMAD	PAN dan Hanura
4.	Ir. R. Bambang Mursalin, MM, MBA., - Drs. KH. Moh. Shaleh Abdullah	BASMALAH	Demokrat, Golkar, dan PKS
5.	H. Moh. Samarudin Toyib - Drs. H. Abd. Kadir	SAYA	Independen
6.	H. Moh. Kafrawi, SE., - Djoko Sungkono	KD	Independen

⁴⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep tahun 2010.

7.	KH. Ilyas Siraj - Drs. H. Rasik Rahman	IMAN	Independen
8.	H. Sugianto - Drs. KH. Moh. Muhsin Amir	SMS	PPP dan PDP

Sumber: Analisis Data Sekunder tahun 2010

Tabel 2. Latar belakang kedelapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah⁴¹

No	Calon Kepala Daerah	Latar Belakang	Wakil Calon Kepala Daerah	Latar belakang Wakil Calon
1.	H. Azasi Hasan	Birokrat	Dewi Khalifah,SH, MH	Pengasuh PP. Aqidah Usymuni dan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sumenep
2.	KH. A. Busyro Karim, M.Si	Pengasuh PP. Al-Karimiah dan A'wan PCNU Kabupaten Sumenep	Ir. H. Soengkono Sidik	Birokrat
3.	Malik Efendi, SH, MH	Politisi, anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Rahmad, SE	Pengusaha
4.	Ir. R. Bambang Mursalin, MM, MBA	Pengusaha	Drs. KH. Moh. Shaleh Abdullah	Pengasuh PP. Matoliul Anwar
5.	H. Moh. Samarudin Toyib	Pengusaha	Drs. H. Abd. Kadir	Pengusaha
6.	H. Moh. Kafrawi, SE	Pengusaha	Djoko Sungkono	Birokrat

⁴¹ Wawancara dengan Ach. Tirmidzi, S.Ag, anggota PPK Kec. Dungkek 2010 dan Sekretaris Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Dungkek Pereode 2010-2015. Tanggal 6 Januari 2011. Pukul 09.30 WIB.

7.	KH. Ilyas Siraj	Pengasuh PP. Al-Taufiqiah dan mantan ketua PCNU Kabupaten Sumenep periode 2000-2005	Drs. H. Rasik Rahman	Pengusaha
8.	H. Sugianto	Pengusaha	Drs. KH. Moh. Muhsin Amir	Pengasuh PP. Annuqoyah

Sumber: Analisis Data Sekunder tahun 2010

2. Hasil Suara Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010

Seperti kami sebutkan di atas bahwa calon-calon yang bukan berasal dari kalangan *nahdliyyin* ataupun pesantren dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Ini bisa dibuktikan dengan perolehan suara para calon, baik pada putaran pertama ataupun pada putaran kedua. Bisa dilihat dari lima besar perolehan suara terbanyak kesemuanya pada pemilukada putaran pertama adalah kader-kader NU dan berasal dari lingkungan pondok pesantren.

Tabel 3. Jumlah Suara pada Putaran Pertama

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakilnya	Jumlah Suara
1.	H. Azazi Hasan, SE, MM - Hj. Dewi Khalifah, SH, MH	111.569
2.	KH. Busyro Karim, M.Si - Ir. H. Soengkono Sidik	116.677
3.	Malik Effendi, SH. MH. - Rahmad, SE	48.013
4.	Ir. R. Bambang Mursalin, MM, MBA., - Drs. KH. Moh. Shaleh Abdullah	73.635
5.	H. Moh. Samarudin Toyib - Drs. H. Abd. Kadir	31.353
6.	H. Moh. Kafrawi, SE., - Djoko Sungkono	10.074
7.	KH. Ilyas Siraj - Drs. H. Rasik Rahman	111.0007
8.	H. Sugianto - Drs. KH. Moh. Muhsin Amir	42.713

Sumber: Analisis Data Sekunder tahun 2010

Pada putaran kedua pemilukada hanya diikuti oleh dua calon yang menempati suara terbanyak. Dan kesemuanya adalah dari kalangan NU.

Tabel 4. Jumlah Suara pada Putaran Kedua.

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakilnya	Jumlah Suara
1.	H. Azazi Hasan, SE, MM – Hj. Dewi Khalifah, SH, MH	231.250
2.	KH. Busyro Karim, M.Si – Ir. H. Soengkono Sidik	241.622

Sumber: Analisis Data Sekunder tahun 2011

Kiai dan Politik Lokal di Kabupaten Sumenep

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosok kiai dalam kepemimpinan NU di berbagai wilayah mempunyai peran penting. NU dan kiai atau kiai dan NU merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Bagaikan pinang yang dibelah dua. Mempunyai kesamaan dan kemanfaatan yang sama pula. Kiai tidak hanya menjadi pemimpin agama dalam pesantren, akan tetapi ia juga mempunyai peran signifikan dalam hal penentuan kebijakan apapun di tengah-tengah masyarakat kaum *nadliyin* (warga NU). Begitu pentingnya kiai dalam hubungan struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat cukup bergantung pada keputusan kiai, termasuk di dalamnya ialah mengenai pilihan politik.

Sebaliknya NU sebagai wadah gerakan Islam yang dinaungi oleh sekelompok kiai sebagai *stackholders* atau pengurus, tidak lebih sebagai payung gerakan sosial Islam yang menjadikan performa kiai lebih terstruktur dan membumi. Selain itu sosok kiai dalam naungan payung NU seakan terinstitusionalisasikan dalam struktur sosial masyarakat (warga *nadliyyin*).

Benar kiranya masyarakat yang menganut sistem demokrasi bahwa mereka memiliki pilihan sendiri dari hati nurani dalam memilih pemimpin mereka dalam politik. Namun realitas semacam itu kiranya agak terbantahkan pada tataran masyarakat yang menganut sistem patriarkal. Sistem masyarakat patriarkal mensyaratkan masyarakat patuh terhadap pemimpinnya. Dalam hal ini terlihat sedikit banyak dalam hubungan kiai dan masyarakat di kabupaten Sumenep. Hal tersebut terlihat dari jargon sosial *bapak, baphuk, guru, ratoh*. Sebagian besar masyarakat di kabupaten Sumenep sejak dahulu hingga kini yang semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, menjadikan pengabdian kepada orang tua dan guru (kiai) sebagai sesuatu yang sakral dan dijaga.

*"Kiai itu bagaikan emas. Dia dicari oleh banyak orang dan disimpan rapat-rapat di lemari rumahnya. Begitupula kiai, petuahnya jarang tidak diikuti oleh masyarakat. Apalagi di sini (Sumenep) beliau seringkali menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan masyarakat."*⁴²

Kiai merupakan posisi sentral dalam masyarakat Sumenep. Pandangan politik kiai yang acapkali mengarah pada pembenaran kultur keagamaan dan kultrul sosial tidak lain menjadi semacam alat 'propaganda' dalam mendobrak suara pada pemilihan umum kepala daerah kemarin. Hegemoni yang melekat pada posisi kiai membuat kasadaran masyarakat akan demokrasi tidak lagi menjadi keyakinan realistik mereka. Karena adanya anggapan dan jargon *bapak, bephuk, guru, ratoh* semakin membuat posisi kiai tidak lagi sebagai pranta sosial-kegamaan, lebih dari itu ialah sebaga pranata sosial, politik dan eknomi.

Posisi penting kiai tidak lepas dari karakteristik pribadinya yang sarat dengan berbagai nilai lebih. Pada diri kiai melekat kuat otoritas karismatikkenaketinggianilmuagama,kesalehandankepemimpinan. Kondisi seperti ini menjadikan seorang kiai di Sumenep disebut oleh masyarakat sebagai orang yang patut dicontoh (*uswah hasanah*) atau panutan yang baik di lingkungan masyarakatnya. Sebagaimana di sebutkan oleh Rozaki dalam penelitiannya di Madura bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sisi kehidupan kiai dijadikan rujukan oleh masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya dalam aspek agama yang diteladani masyarakatnya, tapi semua aspek, baik itu dalam urusan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya.⁴³

Sementara hubungan antara kiai dan masyarakatnya di Sumenep diikat oleh hubungan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh.⁴⁴ Kharisma yang mempengaruhi aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi, karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka. Sebab itu masyarakat juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional.⁴⁵

Menurut Fawaid Baidlawi bahwa restu kiai secara kultural berpengaruh saat pemilihan umum berlangsung. Ia mengatakan

42 Wawancara dengan H. Fawaid Baidlawi (Rais 'Am MWC NU Kec. Dungkek Kab. Sumenep) pada 15 Januari 2011, jam 18.30 WIB di kediamannya.

43 Abdur Rozaki, *Menabur Karisma Menuai Kuasa; Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004). hlm. 68

44 Wawancara dengan H. Fawaid Baidlawi (Rais 'Am MWC NU Kec. Dungkek Kab. Sumenep) pada 15 Januari 2011, jam 18.30 WIB di kediamannya.

45 Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai; Konsturksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007). hlm. 113-119

bahwa walaupun calon pemimpin daerah berlatar belakang non-pesantren rasanya tidak lengkap apabila belum bersilatullah kepada kiai. Nilai silatullah secara kultural memang menjadi poin penting dalam melakukan penetrasi politik ke tingkat pemilihan.

*"Sepertinya kalau tidak bersilatullah ke kediaman kiai (berpengaruh), para calon pemimpin daerah di Sumenep sulit untuk mendapat tempat di hati masyarakat. Adanya adagium *bephak, bephu, 'guru, ratoh* telah mendarah daging dalam konstruk pemikiran dan realitas masyarakat disini (di Sumenep begitupula di daerah lain di Madura secara umum)."⁴⁶*

Masyarakat Madura, khususnya di Sumenep yang sebagian besar masyarakat *nahdliyyin* berkeyakinan bahwa ketaatan sosial yang dijewantahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih merupakan ajaran sosial yang tertanam secara emosional sejak masih kanak-kanak. Oleh kerana tidak heran apabila pengabdian total diberikan oleh masyarakat pada sosok yang berpengaruh dalam hidupnya. *Bephak, bephu, 'guru, ratoh*⁴⁷ merupakan bagian dari ketaatan masyarakat dalam menjunjung tinggi pranata sosial. Terutama bagi orang pesantren yang sebagian besar dialami oleh masyarakat Sumenep, walaupun secara kuantitatif tidak dapat dihitung, adagium tersebut selalu menjadi cermin dalam bersikap.

Dapat dimaknai secara filosofis bahwa kiai selain sebagai pemangku agama ia mempunyai peran sebagai penjaga pintu gerbang peradaban sosial khususnya di Kabupaten Sumenep. Analogi tersebut menemukan relevansinya pada massifitas kepercayaan sebagian besar masyarakat Sumenep terhadap sosok kiai. Kiai layaknya pintu gerbang dalam merebut kekuasaan, misalnya dalam pertarungan politik di kabupaten Sumenep. Sebagai pintu gerbang kemudian banyak para calon kepala daerah di Sumenep yang hendak 'bertarung' dalam konstelasi politik lokal tidak lengkap bila pintu tersebut tidak dilalui.

Kiai sebagai instisionalisasi agama di tingkatan sosial masyarakat Sumenep, mengacu pada stuktur sosial Robert K. Merton ialah menjadi salah satu dari rangkaian realitas dan kultur sosial. Begitupula institusi formal yang menaungi kiai, sebut saja misalnya pesantren dan organisasi keagamaan NU, menjadi satu rangkaian dalam pembangunan struktur sosial nyata. George Ritzer mengatakan bahwa Merton mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang

46 H. Fawaid Baidlawi, *Op.cit.*

47 Adagium *bephak* (bapak), *bephu* (ibu), *guruh* (guru), *ratoh* (raja atau pemimpin) adalah adagium yang menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat Madura yang memomorsatukan ketaatan dalam hubungan sosialnya.

terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok.⁴⁸

NU dan Politik di Kabupaten Sumenep

Kultur menurut Merton adalah seperangkat nilai normatif yang terorganisir yang menentukan perilaku kolektif masyarakat, dalam NU dikenal yang namanya *khittah*²⁶ yang menjadi landasan berpikir dan bergerak NU. Akan tetapi kemudian nilai-nilai luhur itu banyak terabaikan karena struktur NU tidak lagi terlalu memperdulikan apa-apa yang dirumuskan dalam *khittah* 26 tersebut. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pengurus NU mulai dari tingkat cabang sampai ranting yang terlibat terlalu jauh masuk dalam ranah politik praktis. Yang demikian inilah kemudian disebut dengan *anomie* dalam konsepnya Merton.

Padaحال secara tersurat telah disebutkan bahwa NU secara struktural telah menarik diri dari panggung politik. Adanya kader-kader NU yang sudah bertarung dalam persilatan politik lokal di Sumenep tidak lepas dari kultur masyarakat yang sebagian besar warga Nahdlyin dan pengaruh kultur Kiai masih melekat sebagai pintor gerbang politik. Hakikatnya NU sebagai organisasi massa yang secara sengaja menarik diri dari panggung politik juga diungkapkan oleh H.A. Pandji Taufiq selaku ketua *tanfidziyah* PCNU Kab. Sumenep. Ia mengemukakan bahwa politik NU bukanlah politik struktural akan tetapi gerakan politik yang dibangun dari kesadaran kultural warganya, antara Kiai dan masyarakat.⁴⁹

Pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa Kiai adalah sosok panutan segala kebijakan masih tetap tercipta dalam benak masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kefanatikan masyarakat yang dibarengi dengan lemahnya pengetahuan politik mengakibatkan masyarakat melakukan apa yang diinstruksikan Kiai mengenai mana parpol dengan kandidat yang diajukan adalah merupakan pilihan yang terbaik bagi masyarakat. Mereka percaya apa yang menjadi pilihan Kiai merupakan suatu jalan yang terbaik. Sebab Kiai dalam pandangan masyarakat adalah sosok pemimpin yang dianggap mempunyai kharisma yang banyak melakukan pendekatan spritual kepada Tuhan terhadap segala permasalahan yang dihadapinya, baik untuk kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Dalam hal memilih pasangan calon pemilu, biasanya Kiai

48 George Ritzer dan Douglas J. Goodman (ed), *Teori Sosiologi Modern (terj)*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm. 142

49 Wawancara dengan H.A. Pandji Taufik di kediamannya.

melakukan salat sunnah *istikharah* untuk memastikan mana pasangan calon yang lebih mendekati kebaikan bersama. Kiai misalnya sebagai entitas kultural NU, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pemenangan suatu calon.

Mengacu pada teori kharisma Weber, bahwa identitas kultural seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan pendapat umum dari suatu golongan atau masyarakat. Memang secara politis kiai tidak mempunyai hubungan akademis pada teoritis politik. Tapi kiai yang telah terinstitusionalisasikan oleh kharisma, ia secara langsung berubah menjadi institusi individual yang sangat diperhitungkan dalam menciptakan citra politik etis kaum bersarung.

Peran Politik NU di Kabupaten Sumenep dalam Pemilu 2010

1. Peran NU dalam Pemilu di Kabupaten Sumenep

Tentang jarak dan pilihan politik warga *nahdliyyin* memang sepenuhnya dipasrahkan terhadap pemilih bersangkutan. NU tidak mempunyai wewenang untuk menggemboskan partai tertentu atau dengan membuat kebijakan formal terhadap suatu pilihan politik warganya. Namun adanya kiai secara tidak langsung, mengacu pada Gramsci tentang hegemoni sosial, kekuasaan kiai diperoleh dari sebuah "konsensus" bukan kekerasan ataupun pemaksaan. Konsensus yang terbangun ialah adanya keterikatan secara emosional antara masyarakat dan sosok kiai sebagai 'pemegang' jalur hukum sosial agama.

Hal itu senada dengan pengalaman yang dikemukakan oleh H. Fawaid Baidlawi di lingkungan sekitarnya. Ia mengatakan bahwa NU ialah kiai. Walaupun secara politis kadangkala kiai tidak mempunyai sikap formal seperti halnya organisasinya (NU), namun secara kultural hubungi pemilih dalam penggunaan suara di pemilu sedikit banyak melibatkan sosok kiai sebagai rujukan dalam memilih.

*"Seorang tetangga kampung sebelum pencoblosan datang sama saya. Katanya "pak haji, calonna se bener se ka'dimmah? Kuleh posang bennyak oreng nyoro se fulan, tape kan kuleh tak oneng se ka'dimmah se begus. Menorot sampyan paserah se nyaman? (pak haji, calon yang baik yang mana? Saya bingung banyak orang yang nyuruh untuk nyoblos fulan, tapi saya kan tidak tahu mana yang baik. Menurut anda siapa yang baik untuk dipilih)."*⁵⁰

50 Wawancara dengan H. Fawaid Baidlawi di kediamannya.

Dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kepentingan politik dari berbagai golongan di kabupaten Sumenep dibangun oleh kesadaran kultural masyarakat yang menjadikan sosok kiai, pesantren, dan NU sebagai wadah kebijakan publik. Walaupun secara nyata NU di berbagai wilayah termasuk di kabupaten Sumenep tidak ikut secara praksis dalam konstelasi politik, akan tetapi dari berbagai pengalaman yang ada di tengah-tengah masyarakat nama besar NU dengan segala bendera sosialnya telah secara tidak langsung memberikan nafas hidup masyarakat untuk menentukan pilihan politik mereka. Dalam kacamata konflik Ralf Dahrendorf masyarakat terbagi menjadi dua. Yaitu sebagai masyarakat konflik dan masyarakat konsensus. Adanya kesepakatan mengembalikan NU pada bentuknya semula sebagai organisasi sosial-keagamaan tidak lain sebagai bagian dari konsensus yang diambil di tengah-tengah arus hegemoni politik dari berbagai oknum atau kelompok yang hendak menguasai NU sebagai ladang kepentingan politik mereka.

Jadi hegemoni politik NU sebagaimana menjadi digariskan oleh Gramsci tidak lain adalah terbangun dari kesadaran dan solidaritas sosial masyarakat yang berpaham ahlussunnah waljama'ah. Bukan berdasarkan pada kebijakan politik NU *an sich*. Sebab NU jauh-jauh hari memang membuat garis damarkasi antara domain kepentingan politik dan domain kepentingan sosial-keagamaan. Jadi NU pada percaturan politik di kabupaten Sumenep, sejak dari awal pemilihan kepala daerah secara langsung, memang tidak menghendaki keterlibatan secara praksis dan struktural yang pada akhirnya berat sebelah terhadap kepentingan partai politik tertentu. Kalaupun ada sebagian besar warga NU di partai tertentu, tidak lain karena adanya kedekatan emosional para pengurusnya yang *nota-bene* kiai dengan masyarakat.

Kalaupun ada sebagian besar warga NU tergabung dalam partai politik tertentu, hal tersebut tidak lain merupakan ketidaksengajaan kebijakan politik yang dibangun oleh perorangan ataupun individu. Hal tersebut acapkali terbangun dari sebuah pengaruh tokoh publik dalam partai tersebut. Misalnya yang berada di dalam PKB, tidak lepas dari andil Abdurrahman Wahid yang mempunyai pengaruh luas ke segenap elemen masyarakat. Disinilah posisi kharisma, seperti mejadi garis besar teoritis kepemimpinan Max Weber, bahwa pengaruh sautu tokoh dengan segala atribut sosialnya acap kali menjadi landasan pola

pikir dan bertindak bagi hubungan dan terbangunnya realitas sosial berkesinambungan.⁵¹

NU di kabupaten Sumenep tidak terlibat secara langsung dalam percaturan politik lokal. Secara struktur masyarakat mengenal kiai mereka di tubuh NU, menjadikan NU yang sudah berurat berakar di dalam sendi-sendi sosial masyarakat mengakibatkan pilihan politik masyarakat menjatuhkan pilihan politik mereka kepada calon yang diresdikan NU (secara kultural). Restu kultural yaitu restu yang diberikan oleh para kiai yang mempunyai peran signifikan di dalam tubuh organisasi NU, misalnya sebagai pengurus ataupun berpaham sebagai ahlu sunnah wajlama'ah.

Mencermati fenomena sosial pada pemilihan umum pada tahun 2010 lalu menjadikan posisi NU penting. Ia menjadi semacam *katalisator* penggerak untuk masyarakat untuk menyumbangkan suara mereka pada pemilu pada kemarin. Misalnya masih tingginya suara PKB di DPRD menyiratkan bahwa PKB yang mengklaim dirinya sebagai partai politik yang diresdikan oleh kalangan kiai sepuh, seakan menjadi ampuh dalam menarik konstituen politik. Walaupun akhirnya pada pemilu pada 2010 lalu, antara PKB dan NU secara institusi-nonformal tidak terdapat komunikasi baik untuk membicarakan dua kepentingan berbeda.

Akan tetapi dalam hubungan normatif antara NU dan PKB di kabupaten Sumenep untuk saat ini seakan terdapat jarak antar keduanya. PKB yang mengklaim diri sebagai anak sah dari NU, seakan mati kutu akibat adanya konflik kepentingan dari beberapa kubu ataupun oknum baik dari pengurus NU sendiri ataupun PKB. Walaupun demikian masyarakat masih merasa yakin bahwa PKB dilahirkan semata-mata dari NU sebagai jawaban politik bagi kesejahteraan umat. Disamping itu ketokohan Abdurrahman Wahid sebagai pendiri dan deklarator PKB, memberikan stimulus positif bagi masyarakat di kabupaten Sumenep yang notabene mengidolakan beliau. Terlihat sejak dari dikenalnya nama Abdurrahman Wahid sebagai tonggak perubahan PBNU, menjadi presiden, hingga kuburannya yang acap diziarahi oleh masyarakat Madura di Jombang.

Kini nama besar PKB di berbagai wilayah semakin menipis taringnya. Terlihat dari semakin tipisnya perolehan suara partai dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga terlihat di kabupaten Sumenep. Walaupun tidak terjadi penurunan suara pada pemilu pada tahun 2010 lalu, akan tetapi hubungan struktural kepengurusan NU dan

⁵¹ *Ibid.*

PKB seringkali bersebrangan.

“Hubungan PKB dengan NU tidak ada komunikasi yang baik. Sejak tahun 2000 keduanya jalan sendiri- diri. Sebenarnya kalau keduanya ketemu sebagian persoalan-persoalan yang ada akan terselesaikan dengan baik. Karena di dewan sebagian besar itu anggotanya dari PKB. Pada tahun 1999 anggota PKB itu 45 kursi dari 60 kusri di dprd. Dimana-mana PKB selalu bilang punya hubungan dengan NU, tetapi sebenarnya praksisnya enggak.”⁵²

Adanya kesenjangan sosial yang ada di beberapa golongan di tubuh NU dan partai politik secara tidak langsung memberikan pengaruh kuat pada warga NU yang lain sebagai pemilih di pemilukada. Praktik politik yang berbeda dan berdasarkan kepentingan parsial berbeda menjadikan NU seakan tidak mempunyai taring merebut kuasa politik yang dibangun oleh NU kultural, dalam hal ini beberapa kiai. Anomi semacam itu memberikan peluang baru bagi terbangunnya hubungan politik banyak kader NU. NU secara struktural tidak mewajibkan warganya untuk memilih satu calon, namun secara kultural sebagian besar kiai dan tokoh masyarakat yang berpaham ahlussunnah waljama'ah sebagai kekuatan kultur mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Disinilah anomie seperti digariskan Robert K. Merton, bahwa kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok.⁵³ Adanya fragmentasi pilihan politik antar elit NU dan mayoritas warganya di berbagai wilayah menjadikan NU sebagai rumah kembali merupakan harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Segala kepentingan politik yang terjadi di tengah-tengah pemilihan politik praksis seyogianya dapat dileburkan di dalam hubungan kultural sebagai bagian dari nafas NU. Adanya anomie di tengah-tengah pilihan politik masyarakat pada pemilukada tahun 2010 lalu seakan menjadi rahasia publik bahwa perbedaaan sikap antara calon yang berasal dari para elit NU dengan kader kultural NU semakin nampak dan hal tersebut menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan dan keutuhan NU di masa mendatang.

Pilihan politik memang lumrah terjadi dimanapun. Begitupula yang terjadi di kabupaten Sumenep. Pilihan politik yang berasaskan paham ahlussunnah waljama'ah selalu menjadi

⁵² Wawancara dengan Dardiri di kediamannya pada 3 Januari 2011, jam 20.40 WIB di kediamannya.

⁵³ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 142

jargon politik antar golongan partai dan calon kepala daerah. Hal tersebut terlihat besar ketika terjadi pemilukada dua kali yang dimenangkan dari partai berbeda tapi masih mempunyai nafas yang sama dari gerakan kultural NU. Walaupun pada akhirnya K.H. Busyro Karim, M.Si yang memenangkan pertandingan akhir, tidak menjadikan warga NU yang berbeda politik tidak memunculkan konflik horizontal.

Disinilah nilai kearifan lokal warga NU yang bertarung dikancah politik praksis di kabupaten Sumenep. Walaupun terdapat pilihan politik berbeda hingga memenangkan dua suara besar yang calonnya berlatar belakang NU, akan tetapi tidak menjadikan kepentingan politik parsial memecah belah masyarakat di berbagai wilayah di kabupaten Sumenep yang sebagian besar warga NU. NU secara struktural memang tidak mempunyai andil dalam pelibatan politik praksis. Namun secara kultural masyarakat dan elitnya bermain-main memerankan posisinya masing-masing dalam merebut suara.

NU berperan besar dalam meminimalisir konflik dalam pemilukada kabupaten Sumenep 2010. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik fisik selama berlangsungnya pemilukada kemarin. Padahal pemilukada di sumenep dilaksanakan dua kali putaran. Di daerah-daerah lain yang pemilukadanya dua putaran bisa dipastikan konflik horizontal terjadi seperti halnya di Mojokerto, Situbondo, dll. realitas politik tersebut juga diakui oleh Gubernur Jawa Timur dalam sambutannya pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Peran NU dalam Dunia Politik

Secara garis besar NU sangat berperan terhadap pencaturan dunia politik lokal di kabupaten Sumenep. Walaupun secara struktur NU tidak melibatkan diri dalam politik praksis, namun orang-orang yang aktif dalam masing-masing partai ataupun kontestan calon kepala daerah sebagian besar ialah warga NU. Dalam menentukan kebijakan politik serta menjaga relasi sosial harmonis, NU secara kultural sangat berperan dalam menentukan konstelasi politik. Secara garis besar misalnya, selama pemungutan suara berlangsung dua kali putaran hingga pelantikan kepala daerah yang baru konflik yang rentan terjadi tidak muncul ke permukaan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran kiai

dan pengurus NU, baik secara struktural ataupun kultural jauh-jauh hari telah memberikan semacam maklumat kepada para pemilih (terutama warga NU sendiri) untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi apapun.

Realitas politik di kabupaten Sumenep yang menyelaraskan demokrasi dan harmonisasi secara tidak langsung telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten Sumenep. Walaupun pengaruh kiai sangat besar, disamping itu rasionalitas pemilih yang mulai meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa etensitas pemilih dalam memilih calonnya tidak semata-mata berdasar kepentingan egoisme. Kalaupun ada hal tersebut barangkali dapat diukur dari sekian persen masyarakat pemilih rasional-pragmatis.

Seperti dikatakan Dardiri bahwa walaupun tidak dapat diukur secara seksama, masyarakat pemilih di kabupaten Sumenep yang cenderung pragmatis tidaklah sedikit. Hal tersebut terlihat misalnya diacuhkannya fatwa beberapa kiai yang secara terang-terangan menyeru untuk memilih salah satu calon yang direkomendasikan.

Adanya pendidikan yang baik bagi warga NU disamping kekuatan kultural NU yang melekat pada setiap sendi kehidupan masyarakat di kabupaten Sumenep, merupakan salah satu pengambilan kebijakan politik NU terapan. Hal tersebut secara tidak langsung menciptakan realitas sosial holistik bagi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik lagi. Pendidikan politik yang diberikan NU secara kultural dengan topangan hubungan sosial-emosional, seperti dikatakan oleh Dardiri mengenai perilaku pemilih pada pemilu-pemilu selanjutnya, NU dan politik tidak akan tercederai dan warga NU atau elit NU untuk beberapa tahun akan datang dapat dipastikan akan selalu memimpin dan menjadi pemenang di garda depan percaturan politik lokal.

Secara umum pandangan masyarakat terhadap citra politik NU di kabupaten Sumenep cukup baik. Terlihat dari antusiasme masyarakat menyambut para calon kepala daerah yang juga berlatar belakang NU atau berpaham ahlussunnah waljam'ah. Adanya pandangan positif masyarakat terhadap kebijakan politik NU berdasarkan pada adanya sikap para elit NU yang akomodatif terhadap warganya sehingga NU secara struktural memang-memang বেশি dari pertarungan politik praktis di kabupten Sumenep.

Daftar Bacaan

Buku

- Arifin, As'ad Syamsul. (1989). *NU dalam Tantangan*. Jakarta: Al Kautsar.
- Bruinessen, Martin Van. (1994). *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Damam, H. Rozikin. (2001). *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fealy, Greg. (2008). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LkiS
- Feillard, Andree. (1999). *NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LkiS.
- Haidar, M. Ali. (1998). *Nahdatul Ulama dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Syamsul A. (2003). *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*. Yogyakarta: LKiS.
- Johnson, Doyle Paaul. (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terj)*. Jakarta: Gramedia
- Moesa, Ali Maschan. (2007). *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Noer, Delian. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhasim, Ahmad dan Nur Kholik Ridwan. (2004). *Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Ritzer, George- Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan. Jakarta: Kencana.
- Rozaki, Abdur. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwah.
- Sirodj, Ahmad Chufiron. (2008). *Peran dan Posisi Kiai di Tengah Masyarakat Madura*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama.
- Suseno, Fran Magnis. (1999). *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya Membangun Masyarakat Madani*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Turmudi, Endang. (2004). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS
- Ulum, Bahrul. (2002). *Bodohnya NU Apa NU Dibdohi, Jejak Langkah NU Era Reformasi; Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Ar-ruzz Press.

Weber, Max. (2006). *Sosiologi*. terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.

Jurnal, Makalah dan Arsip

Hefni, Moh. Jurnal Studi Keislaman (Vol. XI No. 1 April, 2007). *Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato* dalam KARSA.

Edi Susanto, *Jurnal Studi Keislaman* (Vol. XI No. 1 April, 2007). *Kepemimpinan Kharismatik Kyai*, dalam KARSA.

Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo, terjemahan, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.

Internet

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/2\)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/2)%20Pemilu%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf), diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 45.

<http://www.smpn1.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xMTE5NA%3D%3D>, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 21.

http://www.sumenep.go.id/berita_c.php?pid=11234, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20:03.

<http://berita-lampung.blogspot.com/2010/06/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html>, diakses pada 24 Maret 2011, jam 4:22.

Media Massa

KOMPAS edisi Jumat, 19 Maret 2010.

KOMPAS edisi Jumat, 16 April 2010.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep tahun 2010.

